

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat dikatakan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang secara teknis menggunakan prinsip-prinsip syari'ah merupakan salah satu proses untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam baik dalam skala mikro maupun makro

Lembaga keuangan pada dasarnya sebuah lembaga perantara, berposisi sentral diantara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual, serta antara pengirim uang dan penerima uang. Dan lembaga keuangan bukanlah sebuah pabrik atau produsen yang menghasilkan sendiri uang dan kemudian membagikan atau meminjamkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Sebagai lembaga perantara, modal-utama pertama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitasnya dimata para nasabah atau masyarakat luas. Sedangkan modal-utama kedua sebuah lembaga keuangan ialah profesionalitas, yakni profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang diamanatkan

kepadanya. Ringkas kata, kedua modal utama inilah yakni kredibilitas dan profesionalitas yang ditawarkan dan dijual oleh setiap lembaga keuangan.

Lembaga-lembaga keuangan muncul karena tuntutan objek yang berlandaskan prinsip efisiensi. Dalam kehidupan berekonomi, manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih efisien. Berkenaan dengan konteks keuangan, tuntutan objektif efisiensi tadi tampil berupa keinginan untuk serba dan lebih praktis dalam menghimpun serta meminjam uang, keinginan untuk lebih memperoleh kepastian untuk mendapatkan pinjaman dan mendapatkan imbalan atas jasa penyimpanan/meminjamkan uang, kecenderungan untuk mengurangi risiko serta usaha untuk menekan ongkos informasi dan menekan ongkos transaksi. (Muhammad, 2002:99-100)

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. (Muhammad, 2002:57). Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat paling bawah, untuk mengenal dan memanfaatkan jasa lembaga keuangan. Diantara lembaga yang beroperasi dengan sistem bagi hasil saat ini adalah Baitul Maal Wat Tamwil. (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001:57)

Masyarakat akan memperoleh berbagai keuntungan dari jasa dan layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah, antara lain : *Pertama*, adanya jaminan keuntungan hasil investasi yang konkrit, terukur dan rasional;

*Kedua*, adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi; *Ketiga*, transaksi dapat dilakukan dalam rentang waktu jangka pendek dan jangka panjang; *Keempat*, terhindar dari praktek-praktek bisnis yang monopolistic dan diskriminatif; dan *Kelima*, adanya jaminan kesetaraan antara hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi keadaan ini, lebih memungkinkan bagi penyelenggaraan lembaga keuangan syari'ah yang bebas dari praktek bunga dan terhindar dari unsur kesamaran (*gharar*) dan atau pelipatgandaan keuntungan/riba'. (Hendi Suhendi, 2004:140)

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana yang diinginkan nasabah. Dengan keadaan tersebut keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwill* (BMT) setidaknya mempunyai beberapa peran :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah .
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata (Heri Sudarsono, 2004:97)

Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bergerak memberikan bantuan pinjaman pembiayaan, BMT tidak berposisi sebagai lembaga nirlaba yang tidak menuntut pengembalian pembiayaan. BMT adalah lembaga swadaya yang berfungsi melayani masyarakat dalam memperoleh pinjaman untuk investasi, bantuan modal usaha dan simpanan berdasarkan prinsip syari'ah. (Hendi Suhendi, 2004:141)

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 *Kredit* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian *pembiayaan* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya suatu lembaga keuangan membiayai untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara lembaga keuangan (kreditur) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bagi hasil/bunga yang ditetapkan bersama. (Kasmir, 2005:92-93).

Kaitannya dengan mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, umumnya menetapkan suatu ketentuan teknis yang ditujukan bagi nasabah atau para pengusaha yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan BMT. Ketentuan teknis tersebut, berintikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak-

pihak BMT kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. (Hendi Suhendi, 2004:142).

Bantuan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah merupakan prioritas utama dari program kerja BMT. Sebab, BMT memiliki keyakinan bahwa usaha kecil dan menengah merupakan tulang punggung sistem dalam perekonomian nasional. Usaha kecil dan menengah yang kini banyak bergerak disektor riil, sejenis industri kecil perdagangan dan agrobisnis perlu didukung dan didorong untuk melakukan pengembangan usaha. Sehingga mereka dapat menjadi motor penggerak utama proses percepatan pembangunan ekonomi.

Namun demikian, problem serius dari program ini adalah terjadinya penyelewengan dana pembiayaan yang dilakukan oleh “para debitur nakal”. Sebut saja, kasus penyelewengan tersebut terjadi pada penggunaan dana pembiayaan yang seharusnya bagi kepentingan produksi justru di salahgunakan untuk kepentingan konsumtif. Pada gilirannya, ini berimplikasi kepada terjadinya pembiayaan bermasalah, dimana beberapa pengusaha kecil dan mengalami “gulung tikar”. Keadaan semacam ini tidak hanya menimpa lembaga keuangan konvensional, tetapi juga menimpa lembaga keuangan syari’ah. Dalam keadaan itu, setiap lembaga keuangan mulai memperketat aturan kredit/pembiayaan, tetapi beberapa pelaku usaha menyebutnya sebagai ketidakpercayaan pihak lembaga keuangan terhadap calon debitur. Padahal upaya tersebut, semata-mata dilakukan untuk *treatment dan trusment*.

*Treatment* merupakan istilah dalam manajemen yang biasa digunakan untuk kepentingan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha. Sedangkan *trusment* merupakan sikap kehati-hatian bagi tumbuhnya suatu kepercayaan antara pihak lembaga keuangan dengan calon debitur. Kondisi dilematis dan tarik-menarik bisa saja terjadi antara pihak BMT dan calon debitur, khususnya dalam hal ketentuan pemberian pembiayaan. (Hendi Suhendi, 2004:146-147)

Dalam praktiknya, setiap mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan belum tentu sepenuhnya efektif, disebabkan oleh lembaga itu sendiri maupun karena nasabah yang akan dibiayainya. Dan ini hal yang merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau dikenal dengan kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

Oleh karena itu, pemberian pembiayaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan, penentuan jumlah pembiayaan, penentuan tingkat bagi hasil sampai dengan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT kepada calon nasabahnya yang dilakukan sebelum memperoleh pembiayaan, terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian yang tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan maka dalam tahap ini harus dilakukan penilaian yang mendalam sesuai dengan mekanisme yang ada.

Analisis sebelum pemberian pembiayaan adalah bagaimana pihak bank mendapat keyakinan bahwa dana yang dipinjamkannya dapat selamat dan dapat kembali tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu terdapat hal-hal yang perlu diteliti dalam penilaian permohonan pembiayaan, sehingga upaya menghindari atau memperkecil resiko pembiayaan yang mungkin terjadi dapat dilakukan secara optimal.

Operasional BMT As-salam Trusmi dalam memberikan pembiayaannya didasarkan kepada beberapa prinsip sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh pembiayaan. Prinsip tersebut meliputi dalam 5C, yaitu *Character* (karakter), *Capital* (modal), *Capacity* (Kemampuan), *Collecteral* (Jaminan), *Condition Of Economic* (Kondisi), Atau dengan 7P yaitu *Party*, *Personality*, *Perpose*, *Prospect*, *Payment*, *Profitability*, Dan *Protection*. (Hendi Suhendi, 2004:143). Bila mengacu pada prinsip 5C dan 7P dalam pemberian pembiayaan, maka BMT As-salam Trusmi tidak akan mengalami pembiayaan bermasalah. Namun, fenomena yang terjadi di BMT As-salam Trusmi, walaupun sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut tetapi masih tetap mengalami pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, saya merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penerapan mekanisme pembiayaan yang ada di lembaga keuangan mikro, yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Apakah mekanisme pembiayaan yang diterapkan telah efektif dilaksanakan atau belum.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil Baitul Maal Wat Tamwil (BMT As-salam Trusmi Kec.weru Kab.cirebon) sebagai objek penelitian, yang selanjutnya hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul ***Efektivitas Penerapan Mekanisme Pembiayaan Dalam Operasional BMT As-salam Trusmi Kec.Weru Kab.Cirebon***

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini akan dibagi ke dalam tiga bagian pokok, yaitu sebagai berikut:

### **1. Identifikasi masalah**

#### **a) Wilayah Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian bank dan lembaga keuangan, spesifikasi pada lembaga keuangan mikro, khususnya lembaga keuangan syari'ah yaitu BMT.

#### **b) Jenis Masalah**

Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah adanya ketidakpastian antara harapan dan pelaksanaan dalam penerapan mekanisme pembiayaan di BMT As-Salam Trusmi, karena mekanisme pembiayaan dalam pembiayaan dengan fakta yang menunjukkan bahwa hal ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan pengelola.



## 2. Pembatasan Masalah

Setelah masalah-masalah diatas dapat diidentifikasi, mengingat karena luasnya pembicaraan mengenai pembiayaan, maka dalam hal ini penulis ingin membatasi pembahasan yang akan diketahui dalam penelitian ini, yaitu masalah yang akan dibahas hanya sebatas penerapan mekanisme pembiayaan pada BMT As-salam Trusmi Kec. Weru Kab. Cirebon.

## 3. Pertanyaan Penelitian

- a) Bagaimana penerapan mekanisme pembiayaan di BMT As-salam Trusmi Kec. Weru Kab. Cirebon?
- b) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi BMT As-salam Trusmi Kec. Weru Kab. Cirebon?
- c) Apakah penerapan mekanisme pembiayaan dalam operasional BMT As-salam Trusmi Kec. Weru Kab. Cirebon berjalan efektif?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui penerapan mekanisme pembiayaan dalam operasional BMT As-salam Trusmi Kec. Weru Kab. Cirebon
- b) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dihadapi BMT As-salam Trusmi Kec. Weru Kab. Cirebon dalam penerapan mekanisme pembiayaan.
- c) Untuk mengetahui efektivitas dalam penerapan mekanisme pembiayaan di BMT As-salam Trusmi Kec. Weru Kab. Cirebon.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

a) **Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian bank dan lembaga keuangan, khususnya BMT yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbasis syari'ah dan suatu lembaga intermediasi keuangan dengan pola bagi hasil sebagai alternatif sumber penghimpunan dana yang Islami bagi masyarakat.

b) **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu pengetahuan praktis bagi BMT As-salam Trusmi sebagai bahan masukan pemikiran dan informasi terutama dalam penerapan mekanisme pembiayaan. Dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam operasionalnya untuk dijalankan lebih baik.

c) **Kegunaan Akademik**

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi ekonomi perbankan Islam jurusan syari'ah sebagai sumbangan fikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya masalah lembaga keuangan syari'ah maupun sebagai kebijakan instuisi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Juga untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan dan kewajiban setiap mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program strata 1 (S1) di

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon, Jurusan Syari'ah, Program studi ekonomi perbankan Islam.

### **E. Kerangka Berfikir**

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezekinya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Dan Banyak ayat Al-qur'an dan Hadits Nabi SAW yang memerintahkan manusia agar bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, peternakan, dan lain sebagainya.

Untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapa pun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran instuisi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan Islam. Karena itu,

pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.

(Muhammad Syafi’I Antonio, 2001: 69-170)

Hal ini relevan dalam Al-qur’an Surat Al-maidah : 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: “..., Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya,... (Departemen Agama Republik Indonesia, 1971 : 157).

Masyarakat sekarang ini banyak yang ingin memenuhi kebutuhannya, terutama bagi para pengusaha kecil yang sangat membutuhkan pemberian kredit/pembiayaan untuk melancarkan usahanya melalui pinjaman kredit/pembiayaan baik dari bank maupu non bank. (Muhammad Abdul Manan, 1992:219).

Pada umumnya kendala yang dihadapi para pengusaha kecil adalah kurangnya modal guna meningkatkan usahanya agar dapat lebih produktif dan maju. Secara keseluruhan dalam berbagai jenis usaha khususnya usaha kecil tidak berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan dalam penyediaan modalnya, para pengusaha kecil berupaya dengan kemampuan modal sendiri melalui pinjaman dari pihak ketiga atau debitur serta pedagang uang keliling atau istilahnya adalah rentenir. Hal ini disebabkan oleh sulitnya administrasi dan pengembalian modal yaitu dengan cara memungut bunga. Ini jelas tidak

manusiawi dan bertentangan dengan syari'ah Islam karena bunga termasuk riba dan riba itu haram hukumnya. (Yusuf Qardhawi, 2001:74)

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni mengetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dan kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada. (Heri Sudarsono, 2004:96)

Munculnya BMT ini dalam empat tahun terakhir merupakan fenomena actual yang menarik untuk dicermati, paling tidak bisa dianggap sebagai bukti awal diterimanya dengan baik sistem ekonomi berlandaskan syari'ah ditengah-tengah masyarakat. (Makhalul Ilmi, 2002:47). Namun, permasalahan yang seringkali dihadapi dalam lembaga keuangan ini adalah kurangnya memperhatikan kualitas pengelolaan pembiayaan yang pada akhirnya sangat berpengaruh pada besar kecilnya keefektifan dalam pengelolaan pembiayaan.

Mekanisme pembiayaan adalah cara-cara atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Sebelum memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, seorang calon nasabah haruslah melalui proses pembiayaan yaitu meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan.

BMT akan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif saja karena didalam memberikan pembiayaan BMT sebagai pemberi dana secara

tidak langsung akan dimungkinkan untuk menanggung resiko. Pembiayaan hanya akan diberikan terhadap adanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usahanya.(Afzalur Rahman, 1996:467). Jadi dalam pemberian pembiayaan harus berhati-hati dan selektif karena dapat menyebabkan pembiayaan yang diakibatkan antara lain oleh suasana perekonomian yang sulit. (Kasmir, 2000:76).

Pelayanan pembiayaan usaha merupakan dua jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut pada umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha.

Dalam praktiknya tidak semua badan usaha yang memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan, bahkan tidak sedikit badan usaha yang mati sebelum berkembang akibat terus-menerus menderita kerugian. Agar suatu badan usaha tidak menderita kerugian dan memperoleh keuntungan seperti yang ditargetkan, maka badan usaha tersebut harus dapat mengelolanya. Hal inilah yang dikenal dengan istilah manajemen. (Muhammad, 2005:53).

Manajemen pembiayaan pada dasarnya tidak terlepas dari fungsi manajemen secara umum, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Perencanaan meliputi pengembangan resiko dan pendapatan, serta alokasi pembiayaan. Pengorganisasian menyangkut pengaturan pelaksanaan rencana pencapaian tujuan melalui penentuan kebijakan dan proses, termasuk pengadaan fungsi-fungsi pendukung dan kegiatan penyajian (realisasi)

pembiayaan melalui struktur organisasi. Pengendalian menyangkut proses keputusan, pemantauan, pembiayaan dan pengawasan pembiayaan.(Zainul Arifin, 2002:240).

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka dilakukannya langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam keadaan yang sesuai dengan kondisi pada saat penelitian dilakukan. Data actual hasil dari penelitian tersebut oleh penulis dikumpulkan, dianalisis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Metode ini memudahkan untuk mengungkapkan dan memecahkan permasalahan yang terjadi dilapangan dengan menggambarkan dan memaparkan apa adanya.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam bahasan ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada kaitannya dengan penelitian yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literature kepustakaan.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer (*Primary Data*)

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru. Sumber data primer ini yaitu berdasarkan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, yakni di BMT As-salam Trusmi Kec. Weru Kab. Cirebon.

#### b. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder disebut juga data tersedia. Sumber data sekunder ini yaitu dari tulisan-tulisan yang arat kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku keterangan-keterangan, modul, surat kabar dan literature lainnya yang datanya masih relevan dengan pembahasan skripsi ini, untuk dijadikan sebagai sumber rujukan.

### G. Populasi Dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)



As-salam Trusmi yang berkaitan dengan proses pembiayaan berjumlah 10 orang.

b. Sampel

Dikarenakan populasinya hanya sedikit, sehingga memungkinkan bagi penulis untuk mengambil sample secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik sample jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sample. Maka penulis menetapkan ukuran sample yang diambil sebanyak 10 orang.

## H. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini, penulis mengadakan riset dengan dua metode, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Riset Lapangan (*Field Research*)

Yaitu suatu tehnik pengumpulan data penulis langsung melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden. Adapun cara yang dilakukan adalah observasi (*Pengamatan*), Wawancara (*Interview*), Dan studi dokumentasi.

- 1) Observasi (*Pengamatan*), adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Adapun tehnik observasi langsung ke objek penelitian yaitu, di BMT As-salam Trusmi.



- 2) Wawancara (*Interview*), yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan menanyakan langsung mengenai data-data dan informasi yang dibutuhkan, kepada karyawan BMT As-salam Trusmi.
- 3) Studi Dokumentasi, yaitu suatu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dokumen tersebut berupa buku-buku maupun majalah, annual report, website, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan social dan lain-lain.
- 4) Angket atau Quesioner

Angket adalah daftar pertanyaan yang dapat dijawab oleh informan atau responden. Adapun untuk pengolahan data angket, berpedoman pada table kategori skala likert berikut:

**Tabel 1.1**

Variabel	Alternatif Jawaban	SKOR
X	Selalu (SL)	5
	Sering (SR)	4
	Kadang-Kadang (KD)	3
	Jarang (JR)	2
	Tidak Pernah (TP)	1

b). Riset Perpustakaan (*Library Research*)

Yaitu suatu tekhnik pengumpulan data, penulis melakukan kunjungan langsung ke beberapa perpustakaan dengan cara mengumpulkan, memilih,

dan mempelajari untuk mendapatkan beberapa sumber tertulis. Riset perpustakaan ini adalah dilakukan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. Dan sumber tertulis lain yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini. Hal ini dilakukan sebagai pembandingan dalam melakukan pembahasan.

### **I. Teknik Analisis Data**

Dalam teknik analisis data ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu teknik pengolahan data dengan menggunakan analisa prosentase dan digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana:

- P = Jumlah Jawaban Yang diharapkan
- F = Jumlah responden yang menjawab angket dalam bentuk alternatif
- N = Jumlah Responden
- 100 % = Bilangan Tetap

Untuk memudahkan dalam menarik penafsiran, penulis mengadakan prosentase agar terjadi keseragaman. Untuk penafsiran prosentase, penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto, yaitu:

100%	= Seluruhnya
90%-99%	= Hampir Seluruhnya
60%-89%	= Sebagian Besar
51%-59%	= Lebih Setengahnya
50%	= Setengahnya
40%-49%	= Hampir Setengahnya
10%-39%	= Sebagian Kecil
1%-9%	= Sedikit Sekali
0%	= Tidak Ada Sama Sekali

(Suharsimi Arikunto, 1978 : 10)

Untuk mengukur efektifitas penerapan mekanisme pembiayaan, dari hasil perhitungan angket dapat ditafsirkan melalui pengukuran yang berpedoman kepada Suharsimi Arikunto:

76%-100%	= Baik
56%-75%	= Cukup
40%-55%	= Kurang Baik
Kurang dari 40%	= Tidak Baik

(Suharsimi Arikunto, 1996 : 244)

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri atas:

**BAB I Pendahuluan**, Dalam bab pertama ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Berfikir, Pertanyaan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

**BAB II Landasan Teori**, Dalam bab ini Membahas topik yang relevan dengan penelitian ini yang berasal dari literature, artikel, internet, dan bahan-bahan lainnya.

**BAB III Kondisi Obyektif BMT As-salam Trusmi**, Dalam bab ini membahas mengenai sejarah berdirinya, Visi dan Misi, Profil, serta Prinsip-Prinsip operasional, kemudian Struktur organisasi, dan Produk-produk BMT As-salam Trusmi.

**BAB IV Analisa Dan Pembahasan**, Dalam bab ini membahas tentang efektivitas penerapan mekanisme pembiayaan di BMT As-salam Trusmi, dan produk-produk yang menetapkan system pembiayaan.

**BAB V Penutup**, Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya disertai dengan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi BMT As-salam Trusmi.